



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Diminta Percepat Proyek Tanggul Laut

Pengembang reklamasi menunggu kepastian pemerintah DKI untuk membangun tanggul laut.

### Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

**JAKARTA** - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunggu keesriesuan pemerintah DKI Jakarta menuntaskan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir Jakarta.

Jika pemerintah DKI segera menuntaskan regulasi, pihak swasta bakal berkontribusi membangun tanggul.

Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN), Ferdinanto, mengalokasikan swasta bersedia membangun tanggul karena juga tidak mau daerahnya terkikis ombak. "Pasti mereka melakukan penanggulangan," tutur Ferdinanto kepada *Tempo* kemarin.

Menurut dia, semua pihak harus duduk bersama untuk mempercepat pembangunan yang mesti rampung tahun depan atau pesisir Jakarta terancam diterjang banjir rob.

Tanggul sepanjang 20,1 kilometer itu dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Pembagiannya 25 persen pemerintah dan 75 persen dibangun swasta. Namun, sampai kini, pihak swasta sama sekali belum membangun tanggul dengan alasan belum ada aturannya.

Proyek tanggul laut fase darurat tersebut dikawatirkan terancam molor sejumlah perusahaan swasta yang seharusnya terlibat membangun tanggul laut di Pantai Muliara sepanjang 1,5 kilometer adalah PT

Kapak Naga Indah, Agung Podomoro, dan PT Intiland Development Tbk.

Adapun PT Pembangunan Jaya Ancol bertugas membangun tanggul laut di Ancol sepanjang 7 kilometer. Tapi semua perusahaan tersebut belum memulai pembangunan dengan alasan belum ada landasan hukumnya.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, menyebutkan pemerintah DKI membatalkan pengembang reklamasi itu agar mau membangun tanggul. Namun Gubernur Anies Baswedan justru menghentikan reklamasi. "Kalimat yang paling gampang, sudah miskin sombong," tuturnya.

Menurut Firdaus, seharusnya pemerintah lebih realistis dan tak mempersosialkan reklamasi karena tanggul laut sudah menjadi kebutuhan genting. Jika semua biaya pembangunan tanggul dibebankan kepada negara, hal itu akan memberatkan.

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro berpendapat, proyek tanggul pantai tidak ada hubungannya dengan reklamasi. "Pengembang, termasuk Ancol, hanya butuh kepastian bahwa tanggul harus dibangun," katanya kemarin.

Di sisi lain, menurut Bambang, pemerintah pusat tidak bisa menerbitkan regulasi untuk mengikat swasta karena butuh waktu lama. Pemerintah DKI yang seharusnya mengeluarkan regulasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty

Kusumawati enggan berbicara soal regulasi bagi swasta tersebut. Dia ber alasan sibuk rapat.

Sebelumnya, Tuty dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan sedang membuat payung hukum untuk percepatan pembangunan tanggul.

Menurut Ferdinanto, seharusnya Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Koordinator Perencanaan mengambil alih masalah ini.

Kementerian PUPR mewacanakan rancangan, tapi Anies berupaya menyetop reklamasi Teluk Jakarta. Padahal pengembang reklamasi termasuk pihak yang bakal membangun tanggul laut.

● AVIT HIDAYAT

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Diminta Percepat Proyek Tanggul Laut

## Bagi Tugas Tanggul Laut

**B**adan Perencanaan Pembangunan Nasional membagi kewajiban pembangunan tanggul laut fase darurat National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke sejumlah pihak. Proyek senilai total Rp 9,06 triliun tersebut bakal dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta, dan pihak swasta. Proyek mulai dikerjakan pada 2014 dan diprediksi rampung pada 2019. Spesifikasi tanggul laut di Pantai Utara Jakarta itu terbuat dari tiang *sheet pile* yang dipancangkan setinggi 4-5 meter dari daratan. Di tepi laut juga dibuat bola-bola beton untuk menahan tekanan ombak. ● **AWI HIDAYAT**

### Rincian kewajiban tiap pihak:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun tanggul di Kalibaru dan Muara Baru sepanjang 4,5 kilometer. Proyek ditargetkan rampung pada Mei lalu, tapi bakal molor hingga Juli 2018.

Pemerintah DKI Jakarta pada 2018 memakai anggaran Rp 146,1 miliar untuk membangun tanggul sepanjang 1,2 kilometer di Kali Blencong dan Kali Kamal Muara. Pembangunan hampir rampung dikerjakan.

Pihak swasta diwajibkan membangun tanggul sepanjang 14,4 kilometer sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah daerah. Pembangunan belum dimulai karena terhambat Rancangan Peraturan Daerah mengenai Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tata Ruang Laut Utara Jakarta.

